

324.6
YAW
P e-1



LAPORAN HASIL PENELITIAN

**PERSEPSI CENDEKIAWAN TERHADAP SISTEM PEMILIHAN UMUM
DI INDONESIA
(Studi Kasus Terhadap Dosen Di Beberapa Perguruan Tinggi
di Kotamadya Dati II Semarang)**

Oleh :

Drs. Yuwanto, M.Si.

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
1996**

**Dibiayai Dana DPP/SPP Universitas Diponegoro
Tahun 1995/1996**

HALAMAN PENGESAHAN

- A. Judul Penelitian :
PERSEPSI CENDEKIAWAN TERHADAP SISTEM PEMILIHAN UMUM
DI INDONESIA
(Studi Kasus Terhadap Dosen di Beberapa Perguruan
Tinggi di Kotamadya Dati II Semarang)
- B. Bidang Ilmu : Sosial
- C. Pembimbing:
Nama lengkap : Dra. Endang Hari Oemi, SU
Golongan dan NIP : IIIId (Lektor)
130702195
Fakultas/Jurusan : ISIP/Pemerintahan
Pusat Penelitian : Universitas Diponegoro
- D. Peneliti:
Nama lengkap : Drs. Yuwanto, M.Si.
Golongan dan NIP : IIIa (Asisten Ahli)
131764036
Fakultas/Jurusan : ISIP/Pemerintahan
- E. Lokasi Penelitian : Kotamadya Dati II Semarang
- F. Lama Penelitian : 4 (empat) bulan
- G. Biaya Penelitian : Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus
ribu rupiah)
- H. Sumber Dana : DPP/SPP Universitas Diponegoro
Tahun 1995/1996

Semarang, 10 Oktober 1996

Ketua Peneliti,



Drs. Yuwanto, M.Si.

NIP 131 764 036



UNDIP

Abdul Kahar Badjuri

NIP 130 324 158

ABSTRACT

THE PERCEPTION OF INTELLECTUALS TOWARD THE GENERAL ELECTION SYSTEM IN INDONESIA (Case Study Among Lecturers at Some Colleges in Semarang Municipality)

The main purpose of this research is to describe the perception of intellectuals toward the general election system in Indonesia. To reach the destination, a research was conducted in five colleges, that is Diponegoro University, Catholic University of Soegijapranata, Islamic University of Sultan Agung, The State Institute of Education, and University of 17 Agustus 1945. The research which used analytic-description method took seventy five respondents from five colleges which were researched.

Tabulation analysis of the research shows that three component of perception; that is the knowledge toward the general election system, the judgement toward the practice of the general election, and the opinion of the best general election system; in fact incredibly high.

Most of respondents tend to choose the combination between the district system and the proportional system because of several advantages in each system.

DAFTAR ISI

	Hlm.
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
 BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Penulisan Laporan	16
 BAB II : DESKRIPSI DAERAH PENELITIAN	17
A. Keadaan Geografis dan Demografis	17
B. Keadaan Sosial Ekonomi	27
C. Struktur Ekonomi	30
D. Pendapatan Masyarakat	36
 BAB III : ANALISIS DAN INTERPRETASI DATA	39
A. Pengantar	39
B. Identitas Responden	39
C. Analisis dan Interpretasi Data	44
C.1. Pengetahuan Terhadap Sistem Pemilu..	44

C.2. Penilaian Terhadap Pelaksanaan	
Pemilu	50
C.3. Preferensi Terhadap Sistem Pemilu...	60
BAB IV : PENUTUP	66
Kesimpulan	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN :

Daftar Pertanyaan

Surat Rekomendasi Penelitian

DAFTAR TABEL

	Hlm.
II.1. Prosentase Luas Kecamatan Se-Kodya Dati II Semarang	18
II.2. Luas Kodya Dati II Semarang Menurut Penggunaannya Per Kecamatan	19
II.3. Jumlah Penduduk	22
II.4. Kepadatan Penduduk Per Kecamatan	23
II.5. Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur..	24
II.6. Mata Pencanharian Penduduk	27
II.7. Tingkat Pendidikan Penduduk	28
II.8. Sarana Pendidikan	29
II.9. Peranan Masing-Masing Sektor Terhadap PDRB Kodya Semarang Tahun 1983	31
II.10. Peranan Masing-Masing Sektor Terhadap PDRB Kodya Semarang Tahun 1993	33
II.11. Distribusi Peranan Beberapa Sektor Ekonomi Yang Dominan di Kodya Semarang	34
III.1. Distribusi Responden Menurut Umur	40
III.2. Distribusi Responden Menurut Jenis Kelamin	41
III.3. Distribusi Responden Menurut Agama	42
III.4. Distribusi Responden Menurut Jenjang Pendidikan	43
III.5. Pengetahuan Terhadap Sistem Pemilu	44

III.6.	Pengetahuan Terhadap Sistem Pemilu Orde Baru	45
III.7.	Pengetahuan Terhadap Tahapan Pemilu	46
III.8.	Pendapat Mengenai Nol Kursi Bagi PPP dan PDI Dalam sistem Distrik	49
III.9.	Penilaian Tentang Pelaksanaan Pemilu	50
III.10.	Penilaian Terhadap Tahapan Terjadinya Penyelewengan	51
III.11.	Penilaian Terhadap Mobilisasi Dana Kampanye	53
III.12.	Penilaian Terhadap Tindakan Hukum Atas Pelanggaran dalam Pemilu	54
III.13.	Keterlibatan PPP dan PDI Dalam Pelaksanaan Pemilu	55
III.14.	Penilaian Tentang Isu Kampanye	56
III.15.	Penilaian Terhadap Vote-Getter	57
III.16.	Pendapat Tentang Pengaturan Kampanye OPP...	58
III.17.	Pendapat Mengenai Litsus Wakil Rakyat	59
III.18.	Persepsi Terhadap Penyebab pelanggaran Pemilu	60
III.19.	Pendapat Tentang Organisasi "Ekstra-Elektoral"	61
III.20.	Persepsi Tentang Sistem Pemilu	62
III.21.	Pendapat Tentang Penggabungan Sistem Pemilu	63
III.22.	Pilihan Sistem Pemilu Untuk Indonesia	63
III.23.	Pendapat Tentang Pemilu 1997	64

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pelbagai wacana (discourse) mengenai proses demokratisasi di negara-negara berkembang, sistem pemilu merupakan salah satu topik utama yang selalu diperbincangkan. Hal ini disebabkan karena secara konseptual demokrasi itu sendiri berkaitan dengan bagaimana alokasi kekuasaan dibuat atau bagaimana kekuasaan terbagi di dalam masyarakat. Sebagian ilmuwan politik berpendapat bahwa kekuasaan merupakan nilai kunci dalam politik, melalui mana semua nilai yang lain dapat dipenuhi. Dengan demikian kekuasaan bisa menjadi alat dan dapat pula sebagai tujuan.

Terlepas dari pengertian kekuasaan, sistem politik yang demokratis meyakini bahwa seluruh warganegara sudah semestinya mempunyai hak untuk menikmati kekuasaan dengan cara, antara lain, berpartisipasi dalam kegiatan politik seperti pemilu. Jadi salah satu *raison d'être* dari pemilu adalah demokrasi; artinya bahwa pemilu sangat diperlukan untuk mewujudkan nilai-nilai demokrasi dalam rangka penyelenggaraan kehidupan bernegara.

Di pentas nasional akhir-akhir ini, kembali marak pembicaraan mengenai sistem pemilu. Perdebatan datang dari pelbagai kalangan masyarakat, baik politisi dan

birokrat maupun dari kalangan akademisi. Bahkan tidak kurang Presiden Soeharto sendiri ikut memberikan perhatian dengan menugasi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) guna meneliti sistem pemilu ideal macam apakah yang cocok untuk diterapkan di Indonesia.

Secara umum perdebatan dimulai dari sorotan terhadap praktik penyelenggaraan pemilu selama ini yang oleh banyak pihak dinilai belum luber atau jurdil. Kualitas pelaksanaan pemilu ini kemudian secara kausalitas juga dihubungkan dengan sistem kepartaian dan peranan lembaga legislatif di Indonesia.

Dari silang pendapat yang mengemuka (seperti yang dapat dicermati melalui media massa) mengenai sistem pemilu, tampak bahwa pusaran pembicaraan terletak pada dikhotomi preferensi antara sistem distrik dengan sistem proporsional (perwakilan berimbang). Mereka yang memilih perlunya diberlakukan sistem distrik sebagai alternatif, mendasarkan diri pada argumen bahwa sistem proporsional yang selama ini dianut ternyata tidak demokratis karena banyaknya penyimpangan yang terjadi. Sedangkan bagi mereka yang tetap menghendaki digunakannya sistem proporsional, berpendapat bahwa sistem distrik tidak cocok untuk diterapkan di Indonesia karena pelbagai kondisi, seperti : tingkat pengetahuan dan kesadaran politik, keadaan geografis dan demografis, serta sistem kepartaian yang diberlakukan. Pihak yang terakhir ini pada umumnya menyatakan bahwa sistem proporsional justru

dianggap demokratis dan representatif karena jumlah kursi sesuai dengan jumlah suara yang diperolehnya dalam pemilu secara nasional (tidak ada distortion effect). Selain itu, sistem ini dianggap adil karena semua golongan dalam masyarakat, termasuk yang kecil sekalipun, mempunyai peluang untuk menampilkan wakilnya di parlemen (Miriam Budiardjo, 1991: 5).

Perdebatan yang ramai tersebut tampaknya berkembang ke arah kerancuan karena pada umumnya para pengamat di Indonesia (baik politisi maupun akademisi) masih banyak yang belum dapat membedakan antara electoral laws dengan electoral process. Di dalam kepustakaan ilmu politik, yang dimaksudkan dengan electoral laws adalah seperangkat aturan dalam sistem pemilu yang berkaitan dengan tatacara atau prosedur pembagian kekuasaan dan penentuan pemenang sebagai hasil dari perolehan suara dalam suatu pemilu. Sedangkan electoral process ialah mekanisme penyelenggaraan pemilu mulai dari pendaftaran pemilih (siapa yang boleh dan tidak boleh memilih), penentuan calon, proses kampanye (yang menyangkut penentuan waktu, isi kampanye dan siapa yang melakukannya), pemberian suara atau pencoblosan, dan penghitungan suara. Meskipun secara praktikal kedua hal itu tampak sama, namun secara teoritikal akan memiliki implikasi yang amat berbeda, terutama tatkala sampai kepada tataran analisis.

Apapun perbedaan preferensi politik dan sampai dimana pun pemahaman anggota masyarakat terhadap pelbagai gejala politik yang sedang terjadi, wacana tentang sistem pemilu merupakan bagian dari proses politik; yaitu suatu proses yang secara sistemik terentang mulai dari input, konversi, dan output dalam kerangka suatu sistem politik (David Easton, 1984:72). Dalam konteks yang demikian, perdebatan mengenai sistem pemilu dapat dilihat sebagai input terhadap sistem politik, baik input tuntutan (demand) maupun input dukungan (support). Mekanisme input-output merupakan salah satu esensi kehidupan politik; tanpa input suatu sistem tidak akan dapat bekerja dan tiadanya output kita tidak akan dapat mengetahui pekerjaan yang telah diselesaikan oleh sistem (Almond dan Powell, 1966:25-26).

Pembicaraan mengenai sistem pemilu telah meningkat menjadi suatu isu politik, yaitu suatu tuntutan yang oleh anggota-anggota masyarakat ditanggapi dan dianggap sebagai hal yang penting untuk dibahas melalui saluran-saluran tertentu. Di dalam Badan Pekerja MPR hasil pemilu tahun 1992 yang lalu misalnya, FPDI dan FPP cenderung menginginkan sejumlah perubahan politik yang strategik untuk dirumuskan dalam GBHN dan Ketetapan MPR lainnya. Salah satu usulan FPDI ialah perubahan sistem penyelenggaraan pemilu, selain pengaturan lembaga kepresidenan (periodisasi jabatan kepresidenan,

D. Manfaat Penelitian

1. Mendorong para akademisi dan peneliti yang berminat kepada permasalahan pemilu (termasuk voting behavior) untuk mengadakan penelitian lebih lanjut.
2. Memberikan masukan kepada para pembuat kebijakan politik (decision makers) untuk menghasilkan suatu keputusan yang berkualitas, terutama yang berkaitan dengan praktik penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

E. Tinjauan Pustaka

Di kebanyakan negara demokratis, pemilihan umum dianggap sebagai lambang dan sekaligus tolok ukur demokrasi. Hasil pemilu yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan, seperti kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap dengan cukup akurat mencerminkan pendapat para warga negara.

Salah satu tinjauan teoritik terhadap sistem pemilu adalah melalui pendekatan kelembagaan (biasanya sangat menekankan aspek juridis-formal); yaitu suatu upaya penggambaran dan analisis undang-undang tentang pemilu, termasuk kualifikasi-kualifikasi pemberi suara dan mekanisme pemilihannya. Seorang ilmuwan politik bernama Douglas W. Rae mencoba menganalisis konsekuensi-konsekuensi politik undang-undang tentang pemilu terhadap distribusi suara pemilih dan jabatan-jabatan pemerintahan kepada partai-partai politik dengan menggunakan metoda perbandingan guna mendapatkan suatu

besar (bisa seluas propinsi) sehingga sukar untuk dikenal oleh banyak orang. Kedua, peranan partai sangat menonjol (melalui list system) sehingga wakil akan lebih terdorong memperhatikan kepentingan partai daripada kepentingan pemilih.

Memasuki setengah abad merdeka, kita telah mengadakan enam kali pemilu yang kesemuanya menggunakan sistem proporsional. Sesungguhnya pada awal masa Orde Baru ada keinginan untuk mengurangi jumlah partai politik secara alamiah melalui sistem distrik. Namun karena RUU ini ditolak oleh partai-partai pada tahun 1967, maka sistem proporsional digunakan lagi dengan beberapa modifikasi, hingga sekarang ini.

Selanjutnya pada tahun 1973 diadakan restrukturisasi (pengelompokkan) partai-partai politik, sehingga tinggal tiga organisasi sosial-politik. Dengan demikian, mulai tahun 1977 sistem proporsional yang kita gunakan telah berkurang satu kelemahan, yaitu fragmentasi partai. Begitu pula instabilitas seperti yang dialami pada masa demokrasi parlementer, sudah tidak ada lagi. Hal ini disebabkan karena adanya satu orsospol yang mempunyai mayoritas mutlak dan kabinet dapat dibentuk tanpa koalisi. Lagipula dengan sistem presidensiil yang berlaku tidak memungkinkan menjatuhkan kabinet. Sedangkan dari segi keterwakilan (representativeness) dan keadilan, tampaknya sistem proporsional telah dapat merangkumnya. Semua partai

politik, termasuk yang kecil seperti PDI, dapat menghadirkan wakilnya di DPR.

Kebenaran pernyataan-pernyataan di atas segera mengundang pertanyaan manakala diperhadapkan dengan gejala merebaknya pendapat-pendapat yang menghendaki digunakannya sistem distrik di dalam pemilu mendatang. Mengapa muncul fenomena semacam ini atau apakah faktor-faktor pendukung terhadap sistem proporsional yang telah disebutkan di atas hanya merupakan kebenaran hipotetik semata ?.

Jawaban atas pertanyaan di atas dapat dicari, paling tidak melalui dua tahap, yaitu : pertama, melihat praktik penyelenggaraan pemilu yang selama ini telah dilaksanakan dengan menggunakan sistem proporsional, guna menghimpun data mengenai keunggulan dan kelemahannya. Kedua, memperbandingkannya dengan sistem distrik (baik dari segi electoral laws maupun electoral process) sebagai alternatifnya. Apakah sistem yang terakhir ini lebih unggul dan dapat mengatasi kelemahan-kelemahan sistem yang pertama.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini bersifat penjajakan (eksploratif), yaitu suatu penelitian yang bersifat terbuka, masih mencaricari dan belum mempunyai hipotesa (Masri Singarimbun, 1983:3). Sedangkan dari segi pengumpulan data, penelitian ini merupakan suatu penelitian

lapangan (field research) yang dilakukan dengan cara mengamati gejala sosial yang diteliti, berusaha untuk memahami gejala-gejala yang tidak diramalkan sebelumnya dan mengembangkan suatu kesimpulan umum yang mendorong suatu penelitian lebih lanjut.

2. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu data primer (yang diperoleh secara langsung dari responden dengan menggunakan alat kuesioner) dan data sekunder (yang diperoleh melalui kajian dokumentasi). Pilihan terhadap teknik pengumpulan data ini selain terkait dengan tipe penelitian yang telah disebutkan di atas, juga akan menghasilkan data yang lebih bersifat komprehensif. Cara yang demikian ini memungkinkan untuk memahami gejala sosial yang diteliti secara lebih luas dan mendalam.

3. Pemilihan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ditetapkan secara "pilihan sengaja" (purposive), yaitu Kotamadya Dati II Semarang; dengan alasan bahwa sebagai ibukota propinsi, terdapat banyak perguruan tinggi sekaligus banyak bermukim cendekiawan (dalam hal ini dosen) yang diharapkan dapat memberikan informasi-informasi yang diperlukan dalam penelitian ini.

4. Prosedur Pengambilan Sampel

Populasi penelitian adalah seluruh dosen (staf

pengajar) perguruan tinggi di Kotamadya Dati II Semarang; sedangkan sampel penelitian ditentukan secara purposive-random sampling dengan prosedur sebagai berikut :

4.1. Berdasarkan kriteria status perguruan tinggi, misi dan latar belakang para pendirinya, maka dipilih lima perguruan tinggi, yaitu : Universitas Diponegoro, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Negeri Semarang, Universitas Islam Sultan Agung, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, dan Universitas Katholik Soegijapranata Semarang.

4.2. Dari kelima sub-populasi tersebut di atas, secara acak (random) diambil sebanyak 75 sampel sebagai responden penelitian. Sedangkan jumlah sampel untuk tiap-tiap perguruan tinggi ditentukan secara proporsional sesuai dengan jumlah dosen yang ada.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Data yang diperoleh, baik yang berupa isian kuesioner, catatan pribadi maupun rekaman kaset, akan diperiksa dan dicocokkan kembali. Data yang terkumpul kemudian dikelompokkan menurut golongan dan kategori masing-masing. Hasil analisis data yang diperoleh, diharapkan akan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian (research questions) yang telah diajukan.

G. Sistematika Penulisan Laporan

Laporan penelitian ini akan disusun menurut sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, dan metode penelitian yang digunakan.

Bab II : Deskripsi Daerah Penelitian

Berisi tentang gambaran umum daerah penelitian, seperti : keadaan geografis, keadaan demografis, keadaan sosial ekonomi, struktur ekonomi dan pendapatan masyarakat.

Bab III : Analisis dan Interpretasi Data

Berisi uraian mengenai hasil penelitian, yaitu analisis data untuk menjawab pelbagai pertanyaan penelitian yang telah diajukan, seperti : tingkat pengetahuan (pemahaman) responden terhadap sistem pemilu, praktik penyelenggaraannya di Indonesia, dan preferensi mereka terhadap sistem pemilu tertentu.

Bab IV : Kesimpulan

Berisi kesimpulan-kesimpulan hasil penelitian dan tinjauan teoritik atas temuan-temuan (findings) penelitian.